

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Mobilitas Sosial

1. Pengertian Mobilitas Sosial

Mobilitas sosial atau gerak sosial adalah perubahan, pergeseran, peningkatan ataupun penurunan status dan peran anggotanya. Secara etimologis, kata mobilitas tejemahan dari kata *mobility* yang berkata dasar *mobile* (Bahasa Inggris). Kata *mobile* berarti aktif, giat, gesit, sehingga *mobility* adalah gerakan. Secara harfiah, *social mobility* berarti gerakan dalam masyarakat. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke dalam lapisan yang lain.¹

Menurut Kimball Young dan Raymond W. Mack, mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dengan kelompoknya. Apabila seorang guru kemudian pindah dan beralih pekerjaan menjadi pemilik toko buku berarti dia melakukan gerak sosial. Dan juga apabila seseorang yang semula mendapat gaji bulanan yang sedikit kemudian pindah pekerjaan karena tawaran dengan gaji yang lebih tinggi. Proses tadi tidak saja terbatas pada individu-individu saja, tetapi mungkin juga pada kelompok-kelompok sosial. Misalnya suatu golongan minoritas dalam masyarakat berasimilasi dengan golongan mayoritas.²

2. Bentuk-bentuk Mobilitas Sosial

Dilihat dari arah pergerakannya terdapat dua bentuk mobilitas sosial, yaitu:

a. Mobilitas Vertikal

Mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau sekelompok orang pada

¹ Babun Ni'matur Rohmah, Dan Riska Ayu Purnama Sari, Tingkat Perubahan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Buruh Migran, *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj*, 2017, 126

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1982), 219.

lapisan sosial yang berbeda. Mobilitas vertikal mempunyai dua bentuk yang utama yaitu:

- 1) Mobilitas vertikal ke atas (*social climbing*) adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang. Adapun penyebabnya adalah melakukan peningkatan prestasi kerja dan menggantikan kedudukan yang kosong akibat adanya proses peralihan generasi.
 - 2) Mobilitas vertikal ke bawah (*social sinking*) merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses *social sinking* sering kali menimbulkan gejala psikis bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Penurunan itu berupa turunya kedudukan seseorang ke kedudukan lebih rendah atau tidak dihargainya lagi suatu kedudukan sebagai lapisan sosial. Penyebabnya adalah berhalangan tetap atau sementara, memasuki masa pensiun, berbuat kesalahan fatal yang menyebabkan diturunkan atau dipecat dari jabatannya.³
- b. Mobilitas Horizontal

Mobilitas Horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Dengan kata lain mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau obyek-obyek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Ciri utama mobilitas horizontal adalah tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang dalam mobilitas sosialnya. Mobilitas sosial horizontal dibedakan menjadi dua bentuk, antara lain yaitu:

- 1) Mobilitas sosial antar wilayah geografis. Gerak sosial ini adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lain seperti transmigrasi, urbanisasi, dan migrasi.
- 2) Mobilitas antargenerasi, secara umum berarti mobilitas dua generasi atau lebih misalnya generasi ayah-ibu, generasi anak, generasi cucu, dan seterusnya. Mobilitas ini ditandai dengan perkembangan taraf hidup, baik naik atau turun dalam suatu generasi. Penekanannya bukan pada perkembangan keturunan itu sendiri

³ Babun Ni'matur Rahmah, Dan Riska Ayu Purnama Sari, Tingkat Perubahan, 126.

melainkan pada perpindahan status sosial suatu generasi ke generasi.⁴

3. Faktor-faktor Pendorong Mobilitas Sosial

Faktor pendorong mobilitas sosial antara lain sebagai berikut:

a. Kependudukan (Demografi)

Semakin padat jumlah penduduk maka semakin berkurangnya lahan pekerjaan dan pemukiman, sehingga hal ini yang mengakibatkan seseorang berpindah tempat ke tempat lain untuk mencari pekerjaan dan pemukiman.

b. Status Sosial

Status sosial ini berkaitan dengan status sosial yang sama dengan orang tua. Ia tidak akan pernah berfikir bahwa orang tuanya miskin atau kaya karena ia tidak dapat menolak kedudukan orang tuanya sekarang. Jika ia tidak puas dengan kedudukan yang sama dengan orang tuanya, ia akan berusaha untuk menduduki kedudukan yang lebih tinggi dari sebelumnya dengan menggunakan kemampuannya.

c. Situasi Politik

Situasi politik akan mendorong seseorang untuk melakukan mobilitas sosial. Jika kondisi politik suatu negara tidak kondusif sehingga ia terdorong untuk melakukan mobilitas sosial.

d. Keinginan Untuk Melihat Daerah Lain

Keinginan untuk melihat daerah lain ini akan menyebabkan terjadinya mobilitas sosial secara geografis. Contohnya pariwisata, studi banding, dan kunjungan kerja.

e. Keadaan Ekonomi

Mobilitas sosial geografi ini sering terjadi apabila SDA di daerah penduduk padat yang sudah tidak mampu mencukupi kebutuhan untuk hidupnya. Sehingga penduduk tersebut akan melakukan mobilitas sosial dengan mencari lahan yang subur di daerah lain.

4. Faktor-faktor Penghambat Mobilitas Sosial

Faktor penghambat mobilitas sosial antara lain yaitu sebagai berikut:

a. Diskriminasi Kelas

Adanya sistem kelas yang tertutup dalam suatu masyarakat, akan dapat menghalangi mobilitas sosial

⁴ Babun Ni'matur Rahmah, Dan Riska Ayu Purnama Sari, Tingkat Perubahan, 127.

keatas yang membatasi keanggotaan suatu organisasi tertentu dengan berbagai macam syarat dan ketentuan yang ada. Sehingga sangat terbatas orang yang dapat masuk kedalam organisasi tersebut. Hal inilah yang akan menghambat terjadinya perpindahan status seseorang dalam masyarakat.

b. Kemiskinan

Bagi masyarakat yang miskin akan sangat sulit untuk menggerakkan statusnya ke atas. Karena keadaan ekonomi yang serba kekurangan sehingga kemiskina termasuk faktor penghambat mobilitas sosial.

c. Perbedaan Jenis Kelamin

Perbedaan jenis kelamin dalam suatu masyarakat akan sangat berpengaruh meningkatkan statusnya. Seorang pria kedudukannya akan lebih tinggi dari pada seorang wanita. Sehingga perbedaan jenis kelamin merupakan salah satu faktor penghambat mobilitas sosial.

d. Kebudayaan

Kebudayaan yang bersifat tradisional akan menjadi penghambat terjadinya mobilitas sosial. Berbeda dengan masyarakat modern yang cenderung memberikan peluang terjadinya mobilitas sosial dalam masyarakat karena telah didukung dengan kemajuan IPTEK.

e. Pengaruh Sosialisasi Yang Kuat

Sosialisasi yang sangat kuat dalam masyarakat akan menghambat proses mobilitas sosial dalam masyarakat tersebut, terutama berkaitan dengan nilai-nilai dan adat yang berlaku dalam masyarakat.⁵

5. Dampak Mobilitas Sosial

Setiap mobilitas sosial akan menimbulkan peluang terjadinya penyesuaian-penyesuaian atau sebaliknya akan menimbulkan konflik. Menurut Horton dan Hunt (1987), ada beberapa konsekuensi negatif dari adanya mobilitas sosial vertikal, diantaranya adanya kecemasan akan terjadi penurunan status bila terjadi mobilitas menurun dan timbulnya ketegangan dalam mempelajari peran baru dari status jabatan yang meningkat. Diantara dampak dari mobilitas sosial antara lain:

⁵ <https://ensiklozone.blogspot.com/2017/01/faktor-pendorong-dan-penghambat.html?m=1> (diakses pada tanggal 31 Januari 2019)

a. Dampak Positif

Dampak positif dari mobilitas sosial adalah mendorong seseorang untuk lebih maju. Terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata ke strata yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju dan berprestasi agar memperoleh status yang lebih tinggi.

Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat kearah yang lebih baik. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Misalnya, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh kelompok dengan status sosial yang baru sehingga tercipta integrasi sosial.

b. Dampak Negatif

Dampak negatifnya adalah konflik yang ditimbulkan oleh mobilitas sosial dibedakan menjadi 3 bagian antara lain:

1) Konflik antarkelas

Dalam masyarakat terdapat lapisan-lapisan. Kelompok dalam lapisan tersebut disebut kelas sosial. Apabila terjadi perbedaan kepentingan antarkelas sosial maka bisa memicu terjadinya konflik antar kelas.

2) Konflik antarkelompok sosial.

Konflik yang menyangkut antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Konflik ini dapat berupa konflik antara kelompok sosial yang masih tradisional dengan kelompok sosial yang modern dan suatu kelompok sosial tertentu terhadap kelompok sosial yang lain yang memiliki wewenang.

3) Konflik antargenerasi

Yaitu konflik yang terjadi karena adanya benturan nilai dan kepentingan antara generasi yang satu dengan generasi yang lain dalam mempertahankan nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru yang ingin mengadakan perubahan.⁶

⁶ Babun Ni'matur Rahmah, dan Riska Ayu Purnama Sari, Tingkat Perubahan, 127-128.

B. Kesejahteraan Dalam Islam

1. Pengertian Kesejahteraan

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.⁷

Menurut Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, sejahtera yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, Pendidikan, lapangan pekerjaan, kebutuhan dasar dan terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Ali Khomsan, kesejahteraan dibedakan menjadi kesejahteraan lahiriah dan batiniah. Kesejahteraan yang bersifat lahir biasa dikenal dengan kesejahteraan ekonomi. Ukuran kesejahteraan lebih kompleks dari kemiskinan. Kesejahteraan harus dapat memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan kerohanian. Kesejahteraan dapat diraih jika seseorang dapat mengakses pekerjaan, pendapatan, pangan, Pendidikan, tempat tinggal, kesehatan, dan lainnya.⁸

2. Indikator Kesejahteraan

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3-4.

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ
وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ حَوْفٍ ﴿٤﴾

⁷ Amirus Sodiq, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 383-384.

⁸ Babun Ni'matur Rahmah, dan Riska Ayu Purnama Sari, Tingkat Perubahan, 122-123.

Artinya : “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah). yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”.⁹

Berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur’an ada tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka’bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.

- a. Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka’bah, indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan, kita sering mendengar jika ada orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak, harta yang melimpah namun hatinya selalu gelisah dan tidak pernah tenang bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal seluruh kebutuhan materinya telah terpenuhi. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki) seseorang.
- b. Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat di atas menyebutkan bahwa Dialah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, statemen tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, tentu hal ini tidak sesuai anjuran Allah dalam surat Quraisy di atas. Jika hal itu bisa dipenuhi, maka kita tidak akan

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 635-637.

menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan bentuk kejahatan lainnya.

- c. Indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.¹⁰

Ayat lain yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 9 yang artinya adalah:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.¹¹

Berpijak pada ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiyar dan bertawakal kepada Allah, sebagaimana hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi “*Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang melakukan amal perbuatan atau pekerjaan dengan tekun dan sungguh-sungguh (professional)*” (Qardhawi, 1995: 256).

¹⁰ Amirus Shodiq, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah*....., 390-391.

¹¹ Jajasan Penjelenggara Penterjemah, *Al Quraan dan Terdjemahnja*, (Jakarta : Jamunu, 1969), 116.

Pada ayat di atas, Allah juga menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan generasi penerusnya (anak keturunannya) agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan, hal itu bisa dilakukan dengan mempersiapkan atau mendidik generasi penerusnya (anak keturunannya) dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan material, sehingga kelak menjadi SDM yang terampil dan berakhlakul karimah, mengingat anak adalah asset yang termahal bagi orang tua.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Sang Khalik (bertaqwa kepada Allah Swt.), dan juga berbicara dengan jujur dan benar, serta Allah Swt. Juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam hal ketaqwaannya kepada Allah SWT maupun kuat dalam hal ekonomi.¹²

Menurut BPS (1997: 8), indikator yang digunakan untuk melihat kesejahteraan suatu rumah tangga dalam suatu keluarga yaitu:

- a. Pendapatan rumah tangga adalah seluruh penghasilan atau penerimaan berupa uang atau barang dari semua anggota rumah tangga yang diperoleh baik berupa upah atau gaji, pendapatan dari usaha rumah tangga, maupun penerimaan transfer.
- b. Konsumsi makanan rumah adalah makanan yang dikonsumsi anggota rumah tangga tanpa memperhatikan asalnya.
- c. Keadaan tempat tinggal adalah kondisi tempat tinggal seperti kondisi bangunan, ruangan, bahan bangunan yang digunakan serta keadaan sanitasi.
- d. Fasilitas tempat tinggal adalah sarana yang tersedia untuk mendukung kelengkapan tempat tinggal seperti fasilitas air minum, jamban, listrik, telepon dan perabot rumah tangga.
- e. Pakaian anggota rumah tangga adalah pakaian/ bahan pakaian yang dipakai seperti kemeja, celana, dan sebagainya dilihat dari segi mutu dan banyaknya.
- f. Kesehatan anggota rumah tangga adalah kondisi kesehatan anggota rumah tangga dilihat dari segi seringnya

¹² Amirus Shodiq, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah*....., 391-392

- mengalami gangguan kesehatan, baik gangguan penyakit menahun (kronis) maupun gangguan kesehatan lainnya yang dapat mengganggu aktivitasnya.
- g. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan dari tenaga medis/paramedis adalah kemudahan dilihat dari segi ekonomi dan non ekonomi, seperti biaya berobat, terjangkau, penanganan lancar, jarak relatif dekat dan prosedur tidak berbelit-belit.
 - h. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan Keluarga Berencana (bagi yang pernah mengikuti program KB) adalah kemudahan ditinjau dari segi ekonomi dan non ekonomi, seperti mudah mendapatkan alat kontrasepsi, mudah memperoleh konsultasi tentang KB, dan jarak ke tempat konsultasi KB relatif dekat.
 - i. Kemudahan mendapatkan obat-obatan farmasi adalah kemudahan mendapatkan obat-obatan dari apotik dan toko obat.
 - j. Kemudahan dalam mendapatkan fasilitas transportasi adalah kemudahan baik dari segi ongkos transpor terjangkau dan fasilitas kendaraan memadai.
 - k. Kemudahan memasukkan anak ke SD (bagi yang menyekolahkan anak ke SLTP selama 3 tahun terakhir) adalah kemudahan menyekolahkan anak usia SD dilihat dari kondisi ekonomi dan non-ekonomi, seperti kemudahan dalam hal biaya sekolah, jarak kesekolah relatif dekat serta prosedur penerimaan murid baru.
 - l. Kemudahan memasukkan anak ke SLTP (bagi yang menyekolahkan anak ke SLTP selama 3 tahun terakhir) adalah kemudahan menyekolahkan anak usia SLTP dilihat dari kondisi ekonomi dan non-ekonomi, seperti kemudahan dalam hal biaya sekolah, jarak kesekolah relatif dekat serta prosedur penerimaan murid baru.
 - m. Kemudahan memasukkan anak ke SMU (bagi yang menyekolahkan anak ke SMU selama 3 tahun terakhir) adalah kemudahan menyekolahkan anak usia SMU dilihat dari kondisi ekonomi dan non-ekonomi, seperti kemudahan dalam hal biaya sekolah, jarak kesekolah relatif dekat serta prosedur penerimaan murid baru.
 - n. Kehidupan beragama adalah kebebasan menjalankan/menunaikan ibadah sesuai dengan agama

- masing-masing, termasuk adanya sarana, kerukunan dan suasananya.
- o. Kenikmatan suasana hari raya agama (Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Nyepi, Waisak) adalah perasaan sejahtera lahir dan batin.
 - p. Rasa aman dari kamtibmas artinya rasa aman dari segala gangguan kejahatan seperti penodongan, perampokan dan pemerasan.
 - q. Kemudahan mendengarkan radio
 - r. Kemudahan mendapatkan televisi
 - s. Kemudahan mendapatkan bacaan (surat kabar harian, surat kabar bukan harian, majalah, dsb), artinya kemudahan mendapatkan media cetak, seperti koran, majalah, cerita bergambar, dan novel, baik dengan membeli maupun meminjam.
 - t. Kemudahan mendapatkan pekerjaan formal adalah kemudahan mendapatkan pekerjaan dengan waktu tetap, pekerjaan terjamin, tempat tetap dan upah/gaji teratur.¹³

3. Syarat Mencapai Kesejahteraan

Menurut teori yang dikemukakan oleh Muhammad Akram Khan yang ditulis oleh Juhaya S. Pradja dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Syariah* menyatakan bahwa kondisi atau syarat-syarat kesejahteraan yang harus dicapai dalam ilmu ekonomi Syariah meliputi:

- a. Kesejahteraan Spiritual

Adapun syarat untuk mencapai kesejahteraan spiritual yaitu:

 - 1) Khusyuk dalam beribadah (*shalat*) yang diterangkan dalam QS Al Mu'minin 23:1
 - 2) Bertakwa kepada Allah (*at-taqwa*) yang diterangkan dalam QS Al-Baqarah 2:189, QS Ali Imran 3:130,200, QS Al Maidah 5:35,100
 - 3) Berdzikir kepada Allah (*al-dzikir*)
 - 4) Bertaubat dari segala bentuk dosa (*at taubat*)
 - 5) Melakukan pembersihan jiwa (*tazkiyat an-nafs*) yang diterangkan dalam QS Al-A'raf 7:69, QS Al-Anfal 8:45, QS Al-Jumuh 62:10.¹⁴

¹³<https://rahmarizqy.wordpress.com/2018/05/05/indikator-kesejahteraan-keluarga-menurut-bps-1997-dan-bkkbn-2009/> (diakses pada tanggal 24 Oktober 2019)

b. Kesejahteraan Ekonomi

Adapun syarat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yaitu:

- 1) Infak, dalam konsepsi Islam adalah membelanjakan harta untuk orang lain atau kepentingan ibadah sosial dengan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Oleh karena itu, konsep infak lebih luas dengan berbagai ragam. Pertama, infak yang bersifat keharusan yang kemudian disebut zakat bagi mereka yang mempunyai harta yang mencapai jumlah minimal wajib zakat. Kedua, infak meliputi kewajiban yang merupakan hak kelompok fakir dan miskin dalam harta yang dimiliki oleh orang kaya. Ketiga, infak yang sama sekali hanya ditunjukkan untuk memperoleh keridhaan Allah dan pahala-Nya di akhirat kelak. Dengan demikian, infak dalam Islam merupakan suatu mekanisme penumbuhan dan peningkatan kualitas spiritual seseorang. Oleh karena itulah infak dalam kasus-kasus tertentu lebih dirahasiakan. Tidak lagi diragukan kebenaran Al-Qur'an yang menyatakan bahwa infak adalah salah satu syarat untuk mencapai kesejahteraan (*al-falah*) yang diterangkan dalam QS An-Nur 24:31, QS Al-Qasas 28:67.
- 2) Anti Riba. Islam menyatakan bahwa riba adalah penghalang bagi pencapaian kesejahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat yang diterangkan dalam QS Al-A'la 87:14, QS Asy-Syam 91:9.
- 3) Memenuhi janji dan memelihara kepercayaan atau amanat merupakan bagian penting dari proses dan mekanisme pencapaian kesejahteraan. Memenuhi janji dan melaksanakan amanat itu meliputi kehidupan dan interaksi personal, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang memiliki kekuasaan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Diterangkan dalam QS Al-Baqarah 2:3, 25, 219, QS Al-Mu'minun 23:4.
- 4) Adil adalah bagian dari syarat pencapaian kesejahteraan, sedangkan lawannya adalah dzalim. Diterangkan dalam QS Ali Imran 3:130

¹⁴ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), 58-59.

- 5) Enterprise atau kerja keras dalam mengelola sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan hidup merupakan bagian penting dari etos kerja ekonomi Islam. Kesalehan seorang muslim ditandai dengan kemampuan mengelola alam dan bersafari menjemput karunia Allah di muka bumi ini melalui perniagaan dan industri pariwisata. Diterangkan dalam QS Al-Mu'minun 23:28.
- c. Kesejahteraan Kultural
Adapun syarat untuk mencapai kesejahteraan kultural yaitu:
- 1) Mendirikan shalat, baik lima kali sehari semalam atau shalat jum'at yang tidak mungkin dilakukan secara berjamaah tanpa masjid. Masjid tidak bisa dibangun tanpa biaya, keterampilan, dan seni bangunan. Mendirikan shalat pun tidak bisa sempurna tanpa bantuan ilmu astronomi untuk mendapat ketepatan arah kiblat.
 - 2) Ilmu adalah alat untuk mencapai kesejahteraan hidup yang sangat dianjurkan dalam kehidupan kaum muslim. Oleh karena itu, ajaran Islam mengharamkan *khurafat* dan *takhayul* serta menganjurkan setiap muslim untuk menuntut ilmu ke dan dimanapun juga.
 - 3) Islam mengatur tata cara hubungan seksual yang sah melalui pernikahan. Pernikahan adalah suatu perjanjian yang sangat sakral yang berbeda dengan filsafat perkawinan Barat sekuler yang bersifat kontrak sosial.
 - 4) Tidak meminum khamar dan berjudi. Larangan minum khamar bertujuan melindungi kesehatan akal manusia, sedangkan larangan berjudi untuk menekankan betapa pentingnya kerja produktif bagi tercapainya kesejahteraan ekonomis dan sekaligus kesejahteraan kultural.¹⁵
 - 5) Membersihkan lingkungan hidup merupakan syarat lain bagi tercapainya kesejahteraan kultural yang bukan hanya meliputi kebersihan harta dan pakaian, melainkan juga lingkungan hidup secara keseluruhan.
 - 6) Melakukan *al-amr bi al-ma'ruf wa nahy 'an al-munkar* merupakan bagian penting dari syarat

¹⁵ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah.....*, 59-60.

tercapainya kesejahteraan kultural agar masyarakat terus menerus terpelihara dari berbagai kemunkaran dan bencana.

- 7) Menghindari *tabzir* serta tidak membuang waktu dengan sia-sia dan membiarkan kesempatan berlalu tanpa dimanfaatkan dengan baik dan maksimal. Efisiensi dan efektivitas usaha dan segala bentuk aktifitas merupakan syarat penting bagi terciptanya kesejahteraan kultural.
- d. Kesejahteraan Politik
- Adapun syarat untuk mencapai kesejahteraan politik yaitu:
- 1) Berdasarkan niat untuk berjuang di jalan Allah (*jihad*) dalam pengertian melawan kedzliman dan melindungi yang lemah dari kesewenang-wenangan penguasa.
 - 2) Pemerintah memainkan perannya untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya.¹⁶

4. Arti Keluarga Sejahtera

Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, aman, selamat, dan tentram. (Depdiknas, 2001:1011). Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang /maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. (BKKBN,1994:5). Kesejahteraan keluarga tidak hanya menyangkut kemakmuran saja, melainkan juga harus secara keseluruhan sesuai dengan ketentraman yang berarti dengan kemampuan itulah dapat menuju keselamatan dan ketentraman hidup. Dalam rencana pembangunan nasional memberikan petunjuk bahwa pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada terwujudnya keluarga sebagai wahana peresmian nilai-nilai luhur budaya bangsa guna meningkatkan kesejahteraan keluarga serta membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan. UU Nomor 10 Tahun 1992 pasal 3 ayat (2) Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada pembangunan kualitas keluarga yang bercirikan kemandirin, ketahanan keluarga dan kemandirian keluarga.

¹⁶ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah.....*, 61.

5. Tujuan Keluarga Sejahtera

Bertujuan untuk mengembangkan keluarga agar timbul rasa aman, stentram dan harapan masa depan yang lebih baik merupakan salah satu pembentuk ketahanan keluarga dalam membangun keluarga sejahtera. Pelaksanaan pembangunan dalam keluarga sejahtera Dalam PP No. 21 Th 1994, pasal 2: pembangunan keluarga sejahtera diwujudkan melalui pengembangan kualitas keluarga diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu oleh masyarakat dan keluarga. Tujuan: Mewujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, produktif, mandiri dan memiliki kemampuan untuk membangun diri sendiri dan lingkungannya.

6. Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan antara lain:

a. Faktor Intern Keluarga

Faktor intern keluarga ini merupakan faktor yang berasal dari dalam keluarga itu sendiri, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1) Jumlah Anggota Keluarga

Pada zaman seperti sekarang ini tuntutan keluarga semakin meningkat tidak hanya cukup dengan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan, pendidikan, dan saran pendidikan) tetapi kebutuhan lainnya seperti hiburan, rekreasi, sarana ibadah, sarana untuk transportasi dan lingkungan yang serasi. Kebutuhan tersebut akan lebih memungkinkan dapat terpenuhi jika jumlah anggota dalam keluarga berjumlah kecil.

2) Tempat Tinggal

Suasana tempat tinggal sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Keadaan tempat tinggal yang diatur sesuai dengan selera keindahan penghuninya, akan lebih menimbulkan suasana yang tenang dan mengembirakan serta menyejukan hati. Sebaliknya tempat tinggal yang tidak teratur, tidak jarang menimbulkan kebosanan untuk menempati. Kadang-kadang sering terjadi ketegangan antara anggota keluarga yang disebabkan kekacauan pikiran karena

tidak memperoleh rasa nyaman dan tentram akibat tidak teraturnya sasaran dan keadaan tempat tinggal.

3) Keadaan Sosial Ekonomi Keluarga

Untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga, alasan yang paling kuat adalah keadaan sosial dalam keluarga. Keadaan sosial dalam keluarga dapat dikatakan baik atau harmonis, bilamana ada hubungan yang baik dan benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Manifestasi dari hubungan yang benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa penuh kasih sayang, nampak dengan adanya saling hormat, menghormati, toleransi, bantu-membantu dan saling mempercayai.

4) Keadaan Ekonomi Keluarga

Ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan dan sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga makin terang pula cahaya kehidupan keluarga. (BKKBN, 1994: 18-21). Jadi semakin banyak sumber-sumber keuangan atau pendapatan yang diterima, maka akan meningkatkan taraf hidup keluarga. Adapun sumber-sumber keuangan atau pendapatan dapat diperoleh dari menyewakan tanah, pekerjaan lain diluar berdagang, dsb.

b. Faktor Ekstern

Faktor ekstern keluarga ini merupakan faktor yang datang dari luar. Kesejahteraan keluarga perlu dipelihara dan terus dikembangkan agar tidak ada terjadinya kegoncangan dan ketegangan jiwa diantara anggota keluarga karena ini perlu di hindarkan, karena dapat menggagu ketentraman dan kenyamanan kehidupan dan kesejahteraan keluarga. Faktor yang dapat mengakibatkan kegoncangan jiwa dan ketentraman batin anggota keluarga yang datangnya dari luar lingkungan keluarga antara lain:

- 1) Faktor manusia: iri hati, fitnah, ancaman fisik, dan pelanggaran norma.
- 2) Faktor alam: bahaya alam, kerusakan dan berbagai macam virus penyakit.
- 3) Faktor ekonomi negara: pendapatan tiap penduduk atau income perkapita.¹⁷

¹⁷<http://verlynelson31.blogspot.com/2013/11/pengertian-tujuan-dan-tingkatan.html> (diakses pada tanggal 3 februari 2019)

7. Tahapan Keluarga Sejahtera

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu keluarga di Indonesia adalah dengan melihat kriteria tahapan keluarga yang telah ditetapkan oleh BKKBN. Menurut Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN (1996), tahapan keluarga sejahtera terdiri dari:

- a. Prasejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal atau belum seluruhnya terpenuhi seperti spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan KB (keluarga Berencana).
- b. Sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti, kebutuhan akan Pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi.
- c. Sejahtera II, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan sosial psikologisnya tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangan seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.
- d. Sejahtera III, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, atau kepedulian sosialnya belum terpenuhi seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat.
- e. Sejahtera III plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan, serta telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan atau memiliki kepedulian sosial yang tinggi.¹⁸

C. Perekonomian Dalam Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Secara etimologis, keluarga adalah orang-orang yang berada dalam seisi rumah yang sekurang-kurangnya terdiri dari

¹⁸ Babun Ni'matur Rahmah, dan Riska Ayu Purnama Sari, Tingkat Perubahan, 123

suami, istri, dan anak-anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga diartikan dengan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Biasanya terdiri dari ibu, bapak, dengan anak-anaknya, atau orang yang seisi rumah yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan Cholil Mansur mendefinisikan bahwa keluarga merupakan kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang belum dewasa. Keluarga merupakan *Community Primer* yang paling penting dalam masyarakat. *Community Primer* adalah suatu kelompok dimana hubungan antara para anggotanya sangat erat dan pada umumnya mereka memiliki tempat tinggal serta diikat oleh tali perkawinan yang sah.¹⁹

Pendekatan teori sistem memandang keluarga sebagai kelompok yang memiliki sistem hirarki yang artinya bahwa terdapat subsistem yang membuat kualitas keluarga ditentukan oleh kombinasi dari kualitas individu atau relasi dua pihak. Proses saling mempengaruhi antara bagian di dalam keluarga dapat terjadi secara langsung dan tak langsung. Pengaruh secara langsung terjadi dalam hubungan dua pihak misalnya suami-istri, ibu-anak, dan kakak-adik. Adapun pengaruh tak langsung dapat berupa pengaruh satu pihak terhadap hubungan dua pihak yang lain, atau pengaruh dua pihak terhadap pihak yang lain. Misalnya suami yang bersifat suportif akan membuat ibu bersifat lebih sabar. Demikian halnya kualitas hubungan suami istri akan mempengaruhi kepribadian anak. Ayah dan ibu yang sering cekcok akan membuat anak merasa kehilangan tempat berlindung atau orang tua yang sering bertentangan dalam proses pengasuhan anak akan membuat anak sulit menemukan jati dirinya.²⁰ Jadi keluarga merupakan lembaga utama dan paling utama yang bertanggungjawab atas terjaminnya kesejahteraan sosial, kelestarian biologis, dan terbentuknya kepribadian anak dalam lingkungan sosial. Ditengah keluarganya anak dilahirkan dan di didik hingga menjadi dewasa.

2. Struktur Keluarga

Dari segi keberadaan anggota keluarga, maka keluarga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Amirulloh Syarbini, *Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), 71-73.

²⁰ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, (Jakarta : Kencana, 2012), 30.

- a. Keluarga inti (*nuclear family*) adalah keluarga yang di dalamnya hanya terdapat tiga posisi sosial yaitu suami-ayah, istri-ibu, dan anak.
- b. Keluarga batih (*extended family*) adalah keluarga yang di dalamnya menyertakan posisi lain selain ketiga posisi di atas. Bentuk pertama dari keluarga batih yang banyak di temui di masyarakat adalah keluarga bercabang (*stem family*). Keluarga bercabang terjadi manakala seorang anak, dan hanya seorang yang sudah menikah masih tinggal dalam rumah orang tuanya. Bentuk kedua dari keluarga batih adalah keluarga berumpun (*lineal family*). Bentuk ini terjadi manakala lebih dari satu anak yang sudah menikah tetap tinggal bersama orang tuanya. Bentuk ketiga dari keluarga batih adalah keluarga beranting (*fully extended*). Bentuk ini terjadi manakala di dalam satu keluarga terdapat generasi ketiga (cucu) yang sudah menikah dan tetap tinggal Bersama.²¹

3. Fungsi Keluarga

Menurut Berns, terdapat lima fungsi dasar yang harus dimiliki oleh sebuah keluarga, yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Reproduksi, dalam fungsi ini keluarga memiliki tugas untuk mempertahankan populasi yang ada di dalam masyarakat.
- b. Fungsi Sosialisasi/Edukasi, dalam hal ini keluarga menjadi sarana untuk transmisi nilai, keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan teknik dari generasi sebelumnya ke generasi yang lebih muda.
- c. Fungsi Penegasan Peran Sosial, keluarga memberikan identitas kepada para anggota keluarganya seperti identitas ras, etnik, religi, dan sosial ekonomi.
- d. Fungsi Dukungan Ekonomi, keluarga berfungsi menyediakan tempat berlindung, makanan, dan jaminan kehidupan.
- e. Fungsi Dukungan Emosi atau Pemeliharaan, dalam fungsi ini keluarga memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama bagi anak. Interaksi yang terjadi bersifat mendalam, mengasuh, dan berdaya tahan sehingga memberikan rasa aman kepada anak.²²

²¹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan.....*, 6.

²² Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan.....*, 22.

4. Ekonomi Rumah Tangga

Rumah tangga adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan tenaga usahawan. Selain itu, sektor ini memiliki faktor produksi lain, yaitu barang-barang modal, kekayaan alam, dan harta tetap seperti tanah dan bangunan. Mereka menawarkan faktor-faktor produksi ini pada sektor perusahaan. Sebagai balas jasa terhadap penggunaan berbagai jenis faktor produksi, sektor perusahaan akan memberikan berbagai jenis pendapatan pada sektor rumah tangga. Tenaga kerja menerima gaji dan upah, pemilik alat modal menerima bunga, pemilik tanah dan harta tetap lain menerima sewa, dan pemilik keahlian keusahawaan menerima keuntungan.²³

Ekonomi keluarga dapat dipahami sebagai aktivitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya terpenuhinya kebutuhan tersebut secara umum dapat dicapai melalui upaya kerja keras keluarga, baik suami maupun istri serta kerabat yang hidup dalam sebuah ikatan keluarga (rumah). Upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut telah diabadikan dalam Al-Qur'an sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan dalam mempertahankan kehidupan sebagai amanah yang harus dijaga. Dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat:105, Allah berfirman:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
 وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : “Dan Katakanlah "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan”.

²³ Sukarno Wibowo, dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), 21.

Ayat tersebut merupakan ayat perintah yang difirmankan Allah untuk manusia, agar orang-orang muslim mau beraktivitas dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, karena pada dasarnya usaha yang dilakukan dengan niat karena menjalankan perintah-perintah Allah SWT, bekerja bernilai ibadah, dan yang harus diingat adalah aktivitas apapun yang dilakukan manusia dilihat dan dinilai oleh Allah SWT, dan akan diberitahukan suatu saat nanti tentang apa yang dikerjakan selama didunia, dan akan menuai pertanggung jawaban. Ringkasan ekonomi keluarga adalah merupakan kebutuhan keberlangsungan hidup yang perlu diupayakan demi kemaslahatan masa depan. Cara mendapatkannya tiada lain adalah dengan giat bekerja dan berusaha. Manusia diberikan akal yang cemerlang, dan pemikiran yang baik untuk dapat menggali, mengelola serta untuk menguasai dunia dan tidak untuk dikuasai oleh dunia.

5. Pendapatan Rumah Tangga Muslim

Pendapatan rumah tangga yang satu berbeda dengan pendapatan rumah tangga yang lain, sesuai dengan kegiatan perekonomian atau pekerjaan kepala rumah tangga. Akan tetapi pendapatan setiap rumah tangga tidak akan terlepas dari hal-hal berikut:

a. Pendapatan Pokok

Pendapatan pokok dapat berbentuk pendapatan per semester atau semisemester bergantung pada mata pencaharian pokok kepala rumah tangga.

b. Pendapatan Tambahan

Pendapatan tambahan adalah pendapatan rumah tangga yang dihasilkan anggota rumah tangga yang sifatnya tambahan, seperti bonus atau pemberian dana bantuan. Mengkin pendapatan seperti ini sulit diperkirakan dengan pasti.

c. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain dapat berupa bantuan atau hibah dari orang lain atau hasil perputaran harta. Bantuan istri kepada suaminya dalam masalah keuangan rumah tangga dianggap sebagai pendapatan lain-lain karena hal ini dapat membantu pembelanjaan rumah tangga.²⁴

²⁴ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta : Gema Insani, 1998), 103.

6. Aturan Bekerja Dan Berusaha Bagi Rumah Tangga Muslim

Syariat Islam memuat ajaran-ajaran yang mengatur manusia untuk bekerja dan mencari nafkah dengan jalan yang halal. Aturan-aturan yang berlaku bagi rumah tangga muslim di dalam bekerja dan berusaha adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab laki-laki untuk bekerja dan wanita untuk mengatur rumah tangga.
- b. Istri berhak bekerja dengan aturan tertentu.
- c. Usaha itu harus halal dan baik.
- d. Bekerja sesuai dengan batas kemampuan.
- e. Melatih anak bekerja.²⁵

7. Aturan Pembelanjaan Dalam Rumah Tangga Muslim

Pembelanjaan diartikan sebagai upaya pengelolaan harta halal untuk mendapatkan manfaat material dan spiritual yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Syariat Islam mengandung beberapa aturan yang mengatur pengeluaran dalam rumah tangga yaitu:

- a. Suami bertanggungjawab mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan dan batas-batas kemampuannya.
- b. Suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istri yang telah ditalaknya apabila dalam keadaan hamil hingga dia melahirkan.
- c. Suami wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya yang sudah lanjut usia sebagai salah satu bentuk berbuat baik kepada orang tua.
- d. Istri diperbolehkan membantu suaminya dengan cara bekerja atau berniaga dengan ijin suaminya.
- e. Istri bertanggungjawab mengatur keuangan rumah tangga.
- f. Harus seimbang antara pendapatan dan pengeluaran karena istri tidak boleh membebani suami dengan beban yang berada diluar kemampuan suaminya.
- g. Membelanjakan harta untuk kebaikan.
- h. Mengutamakan pengeluaran untuk hal yang primer.
- i. Menghindari pembelanjaan untuk barang-barang yang mewah.
- j. Menghindari pembelanjaan yang diharamkan syariat Islam.

²⁵ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, , 62-70.

- k. Bersifat tengah-tengah dalam membelanjakan harta, yaitu tidak telalu boros dan tidak pula kikir.²⁶

8. Perbedaan Sistem Perekonomian Rumah Tangga Muslim dan NonMuslim

Perekonomian rumah tangga muslim mengandung beberapa keistimewaan yang membedakan dengan sistem perekonomian rumah tangga non muslim, diantara keistimewaan yang terpenting adalah sebagai berikut:

a. Memiliki Nilai Akidah

Perekonomian rumah tangga muslim berdiri atas nilai-nilai akidah yang dimiliki para anggota rumah tangga, yang dapat terwujud melalui terpenuhinya kebutuhan spiritual mereka, diantaranya yang terpenting adalah menyembah Allah, bertaqwa, mengembangkan keturunan, serta keyakinan bahwa harta itu milik Allah SWT.

b. Berakhlak Mulia

Perekonomian rumah tangga muslim berarti berdiri tegak atas dasar kepercayaan, kejujuran, sikap menerima apa adanya, dan sabar.

c. Bersikap Penengahan dan Seimbang

Perekonomian rumah tangga berdiri atas dasar sikap pertengahan dalam segala perkara, seperti pertengahan dalam pengaturan harta dengan tidak berlebihan dan tidak terlalu hemat sehingga terkesan kikir.

d. Berdiri Atas Usaha yang Baik

Perekonomian rumah tangga muslim berdiri diatas usaha dan pencarian nafkah yang baik lagi halal, sesuai dengan aspek spiritual dan aspek etika bagi para anggota keluarga itu.

e. Memprioritaskan Kebutuhan Primer

Perekonomian rumah tangga muslim memegang prinsip mengutamakan kebutuhan primer didalam membelanjakan hartanya. Kebutuhan-kebutuhan sekunder, setelah itu barulah kebutuhan kebutuhan pelengkap.

f. Memiliki Perbedaan antara Keuangan Laki-laki dan Perempuan

Perekonomian rumah tangga muslim membedakan tanggung jawab atau beban keuangan laki-laki dan perempuan, sebab setiap pihak telah memiliki hak masing-

²⁶ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim.....*, 70-81.

masing, misalnya seorang isteri berhak atas maskawin, warisan, serta kepemilikan harta.²⁷

D. Tenaga Kerja Indonesia dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia

Tenaga kerja berasal dari dua suku kata yakni tenaga dan kerja. Tenaga berarti potensi atau kapasitas untuk menimbulkan gerak atau perpindahan tempat pada suatu masa. Sedangkan kerja diartikan sebagai banyaknya tenaga yang harus dikeluarkan dalam kurun waktu tertentu untuk dapat menghasilkan sesuatu. Dengan demikian Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.²⁸

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.²⁹

2. Hak Tenaga Kerja dalam Islam

Islam mengakui adanya kenyataan bahwa harta dihasilkan bersama oleh tenaga kerja dan modal. Oleh karena tenaga kerja itu memiliki posisi yang secara komparatif lebih lemah, Islam telah menetapkan beberapa aturan untuk melindungi hak-haknya. Sebenarnya, hak-hak tenaga kerja itu adalah tanggungjawab majikan dan begitu pula sebaliknya. Hak-hak pekerja itu mencakup: mereka harus diperlakukan sebagai manusia, tidak sebagai binatang beban; kemuliaan dan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada mereka; mereka harus menerima upah yang layak dan segera dibayarkan. Kesemua hak itu diberikan oleh Islam kepada tenaga kerja lebih dari empat belas abad yang silam ketika belum ada konsep mengenai hak buruh semacam itu, belum ada serikat buruh, belum ada piagam penghargaan, dan belum ada gerakan buruh.

²⁷ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim.....*, 49.

²⁸ S. Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), 59.

²⁹ Sulthon Miladiyanto, Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian Di Kabupaten Malang, *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, 53.

Untuk melihat pandangan Islam itu lebih jauh, ada baiknya kita perhatikan beberapa hal berikut ini. *Pertama*, dalam pandangan Islam semua orang lelaki dan wanita itu sama. Islam telah mengharuskan persaudaraan dan kesamaan diantara kaum muslimin serta telah menghapus semua jarak antar manusia karena ras, warna kulit, Bahasa, kebangsaan maupun kekayaan. *Kedua*, sebelum nabi Muhammad, tenaga kerja berasal dari para budak yang bekerja di sektor perdagangan dan pertanian ataupun dirumah tangga, sedangkan hasilnya dinikmati seluruhnya oleh para majikannya. Perlakuan terhadap budak amatlah kejam dan tidak manusiawi. Mereka tidak diberi pakaian layak, makanan layak, dan perlakuan yang layak. Nabi Muhammad tidak hanya memulihkan kehormatan mereka sebagai manusia melainkan juga menaikkan status mereka sampai ketinggian saudara dan sejawat. *Ketiga*, selain menjamin perlakuan maupun kemuliaan dan kehormatan manusiawi bagi tenaga kerja, Islam mengharuskan kepastian dan kesegeraan dalam pembayaran upah. *Keempat*, mengenai segera membayar upah pekerja, Al-Qur'an surat Al-Qasas 25 merujuk kepada cerita tentang nabi Musa ketika ia melarikan diri dari Mesir dan pergi ke Madyan, dan disitulah ia menolong dua orang gadis yang sedang memberi minum sekawan domba, dibayar seketika oleh ayah kedua gadis itu. *Kelima*, nabi kaum muslimin juga menyuruh para pengikut beliau untuk tidak membebani para pekerja dengan pekerjaan yang berat diluar kekuatan fisiknya. *Keenam*, Nabi SAW sedemikian baiknya kepada pembantu beliau sehingga jika salah seorang dari mereka sakit, maka beliau menengoknya serta menanyakan tentang kesehatannya.³⁰

3. Kewajiban Tenaga Kerja dalam Islam

Pada dasarnya, kewajiban pekerja adalah hak majikan. Kewajiban dasar pekerja adalah memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja. Ia harus bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai dengan syarat-syarat kerja secara efisien dan jujur. Ia harus mencurahkan perhatiannya dan komitmen dengan pekerjaannya. Jika ia diberi pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kualifikasinya, maka ia harus sepenuh hati mengambil manfaat dari fasilitas pelatihan tersebut dan menempuh segala cara untuk

³⁰ Muhammad Syarif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), 192-195.

meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya. Secara moral, dia terikat untuk selalu setia dan tulus kepada majikannya dan tidak boleh ada godaan maupun suapan yang dapat mendorongnya untuk bekerja berlawanan dengan tujuan majikannya. Jika ia dipercaya untuk mengurus barang milik majikannya, maka harus dapat dipercaya dan tidak menggelapkan maupun merusak barang tersebut. Hadits nabi kaum muslimin yang menyoroti tanggung jawab dan kewajiban pekerja yaitu dari Abdullah (semoga Allah ridha kepadanya) melaporkan, bahwa utusan Allah (semoga penghargaan dan kesejahteraan dari Allah selalu tercurah kepada beliau) bersabda: *“jika seorang budak bekerja dengan tulus untuk tuannya dan menyembah Tuhan-Nya dengan baik, maka baginya dua pahala.”* (Bukhari)

Kebugaran fisik amatlah penting bagi efisiensi tenaga kerja. Seorang pekerja yang sehat dan kuat akan lebih produktif dan efisien dari pada pekerja yang lemah dan sakit-sakitan. Demikian pula, pekerja yang dapat dipercaya lagi jujur yang menyadari tugasnya akan lebih komitmen dan lebih bertanggung jawab dibandingkan dengan pekerja yang tidak jujur. Bagi seorang pekerja mental, pentinglah baginya memiliki pengetahuan dan kemampuan dan dengan demikian ia mampu memberi layanan di dalam posisinya secara bertanggung jawab. Kualitas ini pun ditekankan pula ketika Al-Qur'an menyebut cerita tentang Nabi Yusuf yang ditunjuk untuk menangani gudang dan lumbung di kekaisaran Mesir. Ayat tersebut menyebutkan: *“Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.”* (QS. Yusuf [12]: 55)³¹

4. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Dalam Undang-undang RI Nomor 39 pasal 8 tahun 2004, disebutkan bahwa setiap Calon Tenaga Kerja baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:

- a. Bekerja diluar negeri
- b. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri.

³¹ Muhammad Syarif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam.....*, 195-197.

- c. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri.
- d. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinan serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang di anutnya.
- e. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan.
- f. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan di negara tujuan.
- g. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri.
- h. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan TKI ketempat asal.
- i. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.³²

Adapun kewajiban TKI menurut UU Nomor 39 tahun 2004 yaitu bahwa setiap calon TKI mempunyai kewajiban untuk:

- a. Menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan.
- b. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja.
- c. Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulauan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

5. Kebijakan Moratorium Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka pengangguran dan kemiskinan yang cukup tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh jumlah angkatan kerja yang terus meningkat, sebaliknya kesempatan kerja semakin terbatas, sehingga mendorong tenaga kerja untuk migrasi ke negara lain untuk

³² Mastur, Ekonomi Keluarga TKI dan Pendidikan Anak di Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat ahun 2017-2018, *Jurnal Pendidikan Dasar.....*, 120

memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Pengiriman tenaga kerja migran Indonesia (TKI) ke luar negeri secara resmi telah diprogramkan oleh pemerintah sejak 1975. Program ini merupakan salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Namun seiring dengan meningkatnya pekerja migran dari Indonesia, muncul persoalan yang mengharuskan pemerintah untuk melindungi pekerja migran. Kasus yang menimpa TKI ini terus meningkat setiap tahunnya, seperti kasus tindak kekerasan, pemerasan, pelecehan seksual, hingga penembakan. Kondisi ini secara umum telah menurunkan martabat bangsa Indonesia dan melecehkan pekerja migran Indonesia. Untuk mengatasi masalah TKI di luar negeri, pemerintah secara terus menerus telah melakukan langkah-langkah penanganan secara signifikan. Di antaranya melakukan kebijakan moratorium penempatan TKI PLRT di lima negara, yaitu Malaysia, Arab Saudi, Suriah, Kuwait, dan Yordania. Moratorium pengiriman TKI yang dimaksud disini adalah penghentian sementara pengiriman TKI.³³

Tujuan kebijakan moratorium pengiriman TKI adalah sebagai upaya untuk membenahi sistem pengiriman atau pelayanan TKI dan meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia. Langkah-langkah perlindungan lain pada TKI yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah, memastikan hanya calon TKI yang telah terdaftar dan tercatat pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kabupaten/kota yang diproses penempatannya. Dengan ketentuan calon TKI yang ditempatkan adalah mereka yang telah dilatih sesuai ketentuan dari negara penempatan, serta memahami budaya dan menguasai bahasa negara penempatan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kelengkapan dokumen terkait dan mengantongi Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Bentuk perlindungan TKI lain adalah Pemerintah Indonesia juga mengupayakan agar Paspor selalu dipegang TKI (tidak disimpan oleh majikan), mengusulkan adanya satu hari libur kerja dalam seminggu, fasilitas untuk melakukan komunikasi

³³ H. Purwaka Hari Prihanto, Kebijakan Moratorium Pengiriman Tenaga Kerja Keluar Negeri dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kualitas Pekerja Migran Indonesia, *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol. 1, No. 7, April 2013, 62-63.

dengan keluarga, serta sistem penggajian melalui rekening bank.³⁴

Dalam memilih opsi moratorium tersebut, pemerintah Indonesia telah mempertimbangkan dampak positif dan negatif. Dampak positif moratorium pengiriman TKI antara lain dapat mempersiapkan tenaga kerja Indonesia yang lebih baik. Dengan melakukan seleksi yang ketat sesuai kompetensi pekerjaan di luar negeri terhadap TKI, diharapkan dapat meningkatkan kualitas TKI di luar negeri, sehingga mereka memiliki posisi tawar yang lebih baik dengan menjadi TKI yang bekerja di sektor formal. Selain bertujuan positif, kebijakan moratorium pengiriman TKI juga berdampak pada pasar kerja di daerah yang selama ini menjadi daerah basis pengiriman TKI. Salah satunya adalah terjadinya peningkatan angka pengangguran. Selain itu kebijaksanaan ini juga dikhawatirkan akan berdampak pada angka kemiskinan, karena secara umum TKI yang bekerja di sektor informal berasal dari rumah tangga miskin. Dengan adanya moratorium pengiriman TKI ini, banyak rumah tangga yang selama ini menggantungkan penghasilan dari kiriman uang hasil TKI, akan kehilangan sumber penghasilannya. Dari hasil perhitungan uang yang dikirim (remitan) para TKI di luar negeri, Indonesia berpotensi merugi sekitar Rp 13 triliun per tahun akibat pemberlakuan moratorium TKI ke Arab Saudi.³⁵

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa karya penelitian terdahulu yang berhubungan dengan dampak peningkatan kesejahteraan keluarga TKI antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Pengarang (Tahun) | Judul | Hasil Penelitian | Relevansi |
|----|---|--|---|--|
| 1. | Babun Ni'matur Rohmah dan Riska Ayu Purnama Sari (2017) | Tingkat Perubahan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Buruh | Hasil penelitian menunjukkan bahwa terlihat perubahan yang terjadi pada | Relevansinya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas |

³⁴ H. Purwaka Hari Prihanto, *Kebijakan Moratorium Pengiriman Tenaga Kerja....*, 63.

³⁵ H. Purwaka Hari Prihanto, *Kebijakan Moratorium Pengiriman Tenaga Kerja....*, 64.

| | | | | |
|---|---------------|--|---|--|
| | | <p>Migran di Desa Panggungrejo Gondanglegi Malang</p> | <p>keluarga buruh migran baik perubahan tersebut dari segi ekonomi, sosial, budaya, bahkan pendidikan yang ada pada keluarga tersebut. Perubahan yang berdampak positif diantaranya perbaikan kondisi ekonomi keluarga sedangkan perubahan yang berdampak negatif diantaranya gaya hidup yang cenderung tidak sesuai dengan kebudayaan setempat dan keretakan antar anggota rumah tangga.</p> | <p>tentang tenaga kerja Indonesia serta dampak dari peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga. Perbedaannya adalah penulis menganalisis dengan menggunakan teori ekonomi Islam.</p> |
| 2 | Mastur (2017) | <p>Ekonomi Keluarga TKI Dan Pendidikan Anak di Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017-2018</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan ekonomi keluarga TKI di Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat secara umum sangat minim sesuai dengan jumlah yang dikirim oleh keluarganya yang bekerja diluar negeri sehingga tidak mencukupi kebutuhan baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan anak-</p> | <p>Relevansinya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang TKI. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Dalam penelitian Mastur di fokuskan pada bagaimana keluarga TKI dapat meningkatkan Pendidikan anak sedangkan dalam penelitian ini difokuskan pada apa saja dampak dari peningkatan kesejahteraan</p> |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | | | <p>anaknyanya sehingga ada yang putus sekolah. Jadi Tingkat pendapatan ekonomi sangat berperan terhadap kelangsungan pendidikan anak baik pada tingkat dasar, menengah, lebih-lebih pada tingkat perguruan tinggi. Sehingga berlangsung atau tidaknya pendidikan seseorang tergantung pada tingkat pendapatan (ekonomi) seseorang dalam membiayai sekolahnya.</p> | <p>keluarga TKI.</p> |
| 3 | <p>Khusnatul Zulfa Wafirotin (2013)</p> | <p>Dampak Migrasi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga TKI Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari hasil menjadi TKI ke luar negeri adalah mampu meningkatkan status sosial ekonomi mereka dan keluarga mereka ditengah kehidupan masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu hubungan keluarga menjadi kurang harmonis, buruknya manajemen keuangan anggota</p> | <p>Relevansinya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang dampak yang ditimbulkan oleh keluarga TKI setelah bekerja di luar negeri. Perbedaannya adalah penulis menganalisis dengan menggunakan teori ekonomi Islam.</p> |

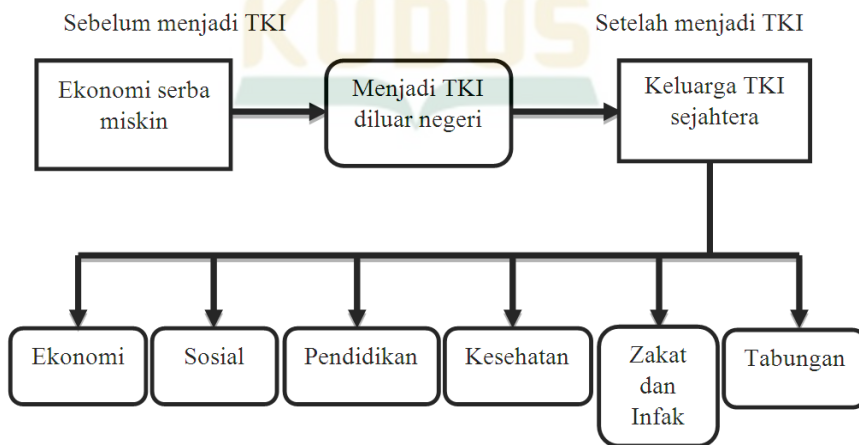
| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| | | | keluarga, sifat konsumtif anak-anak, suami atau istri di rumah dan minimnya pengawasan terhadap tumbuh kembang anak, sehingga perhatian dan pendidikan terutama pengawasan anak-anak tidak bisa optimal. | |
| 4 | Eli Karlina, Muhammad Arif, dan Sodikin (2017) | Pengaruh Bekerja Di Luar Negeri Terhadap Tingkat Ekonomi Dan Perceraian. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesudah bekerja diluar negeri menjadi TKI kehidupan ekonomi mereka mengalami peningkatan yang tinggi karena dengan hasil pendapatan yang mereka dapatkan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan lebih. Perceraian yang dilakukan oleh masyarakat yang bekerja keluar negeri biasanya dilakukan setelah pulang kerumah mengajukan perceraian dengan alasan suami tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap ekonomi. | Relevansinya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang bagaimana peningkatan ekonomi yang terjadi pada keluarga TKI. Perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan hanya terfokus pada kesejahteraan keluarga. |
| 5 | Yuniastuti (2014) | Kehidupan Sosial Ekonomi TKI Dan TKW Serta Dampak Sosial Psikologis Pendidikan Anak | Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran mereka adalah menghimpun dana | Relevansinya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>yang digunakan untuk berbagai keperluan dan menyekolahkan anaknya. Kemudian dana yang terkumpul juga untuk membangun rumah serta memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga. Dampak negatif yang berkaitan dengan kelangsungan pendidikan anak adalah kurangnya kasih sayang dari orang tua yang mengakibatkan kenakalan remaja.</p> | <p>peningkatan ekonomi keluarga TKI. Perbedaannya penelitian yang akan dilakukan hanya terfokus pada kesejahteraan keluarga.</p> |
|--|--|--|---|--|

F. Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori diatas dapat disusun suatu kerangka berfikir pada gambar 2.1 dengan tujuan mempermudah pemahaman mengenai masalah yang akan dibahas oleh peneliti.

**Gambar 2.1
Kerangka Berpikir**



Alur pemikiran dalam penelitian ini adalah sebelum menjadi TKI, kehidupan keluarga sangat sederhana dan serba kekurangan, sehingga memilih untuk bekerja diluar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Setelah berhasil menjadi TKI, ekonomi keluarga menjadi lebih baik dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga TKI dari segi ekonomi, hubungan sosial dengan masyarakat, pendidikan, kesehatan, zakat dan infak, serta tabungan. Sehingga dalam hal ini diperlukan pandangan Ekonomi Islam terkait kesejahteraan keluarga TKI tersebut apakah kearah yang positif atau kearah negatif.

